



Unit Penelitian dan Penerbitan
Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Gadjah Mada

SASDAYA, Gadjah Mada Journal of Humanities

ISSN: 2548-3218 (print); ISSN : 2549-3884 (online); website: <https://jurnal.ugm.ac.id/sasdayajournal/index>

- ✍ *Wowine* dalam Kebudayaan Matirim Wakatobi Buton: Analisis Pierre Bourdieu (*Wowine* in the Matirim Culture of Wakatobi Buton: Pierre Bourdieu Analysis)
- ✍ Penulis/Author(s) : Sumiman Udu
- ✍ Sumber/Source : SASDAYA, *Gadjah Mada Journal of Humanities*, Vol. 2, No. 1 (November 2017), pp. 267-282
- ✍ DOI:
- ✍ Penerbit : Unit Penelitian dan Publikasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Indonesia

WOWINE DALAM KEBUDAYAAN MATIRIM WAKATOBI BUTON: ANALISIS PIERRE BOURDIEU¹

Sumiman Udu²

ABSTRACT

Wowine (female) has a very shining and very sad footprint in the history of maritime culture Wakatobi Buton. Wowine's glorious times were when Queen Wakaa-kaa and Ratu Bulawambona came to power in Buton (Zahari, 1977/1978; Zaenu, 1984). At that time, wowine has a very strategic position in the government system of the Sultanate of Buton. Wowine's involvement in the government system of the Sultanate of Buton, not only occupied his role as queen but also became one of the conditions worthy or not someone become Sultan. The idea of wowine in the maritime culture of Wakatobi Buton was born from the research using Pierre Bordiau approach to see the habits, the realm of maritime Wakatobi Buton in the past, present, and future. This paper shows that the involvement of women in the Sultanate government system of Buton is responsible for the welfare and salvation of the empire. In the life of Buton people, women are responsible for several things, (1) taking care of the child, (2) seeking sustenance together with husband, (3) educating children, and (4) doing deeds, "*amala* or hope" to protect the husband's safety while in outdoors. It is further explained that the empress in the Sultanate of Buton served to: (1) become the head of Sarana Bawina, (Head of the Women's Council of the Sultanate of Buton), (2) safeguard the welfare and health of the sultan, and (3) educate the women in the sultanate. The findings were based on the method used, namely literature study and field study. Library study (script) to find information about the existence of women in the maritime culture Wakatobi Buton in the past. Field observations and interviews to determine the current condition of women in the maritime culture of Wakatobi Buton.

Keywords : *Wowine, Culture, Wakatobi, habitus by Pierre Bourdieu*

¹ Artikel ini pernah disampaikan pada Koferensi Internasional di Bandung tahun 2017. Artikel telah mengalami beberapa perubahan dan mengakomodasi masukan dari konferensi.

² Dosen di FKIP Universitas Halu Oloe Kendari Sulawesi Tenggara, penulis bisa dihubungi email: sumiman_u@yahoo.co.id

PENGANTAR

Wakatobi merupakan salah satu wilayah barata dari empat *bharata*³ yang ada di kesultanan Buton yaitu *bharata* Kaedupa. Sebagai salah satu *bharata*, Wakatobi tentunya masih memiliki keterkaitan budaya dengan kesultanan Buton. Oleh karena itu, ketika membicarakan tentang *wowine* di dalam kebudayaan maritim Wakatobi, maka sesungguhnya kita sedang membicarakan tentang peran perempuan di dalam kebudayaan Buton. Di satu sisi, jika melihat entitas kebudayaan serta pandangan hidup orang Buton, maka sesungguhnya bangsa Buton adalah bangsa maritim. Hampir seluruh sistem hidup mereka menggunakan istilah perahu dan pelayaran.

Bagi orang Wakatobi Buton, hidup dianggap sebagai pelayaran. Tubuh adalah perahu, perkawinan merupakan wadah yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam sebuah perahu yang mereka namakan sebagai keluarga. Dan menjalani sebuah perkawinan sama dengan melakukan pelayaran. Bahkan dalam hal yang lebih jauh, kematian dianggap sebagai sebuah pelayaran (lihat *Bula Malino* karya Muhammad Idrus Kaimuddin). Dengan demikian, maka membicarakan perempuan di dalam kebudayaan maritim Wakatobi, sesungguhnya adalah membicarakan perempuan di dalam kebudayaan Buton itu sendiri.

Kalau kita menengok jauh ke belakang, maka kita akan menemukan bagaimana sejarah perempuan Buton itu mengalami pasang surut yang panjang. (Udu, 2009: 1, Rabani, 1997) mengatakan bahwa Perempuan pernah mengalami masa-masa gemilang di dalam sejarah kesultanan Buton. Keterlibatan perempuan di dalam sistem pemerintahan kerajaan Buton dapat dilihat dari keberadaan ratu Buton pertama dan ratu Buton kedua. Raja Buton pertama adalah Ratu Wakaa-kaa dan raja keduanya adalah Ratu Bulawambona (Zahari, 1977/1978; Zaenu, 1984). Sejak awal kerajaan Buton telah memposisikan perempuan pada posisi strategis dalam sistem kepemimpinannya. Keterlibatan perempuan dalam sistem pemerintahan kesultanan Buton tersebut, bukan saja menjadikan perempuan sebagai ratu. Tetapi juga masuk dalam sistem pemerintahan. Salah satu persyaratan dalam pemilihan sultan Buton adalah apakah istri calon Sultan tersebut layak atau tidak untuk menjadi permaisuri (Schoorl, 2003: 217). Jika tidak layak, maka calon sultan tersebut, tidak akan diangkat menjadi sultan Buton (2009: 2).

Pentingnya penelusuran konsep mengenai keterlibatan perempuan di dalam kebudayaan maritim Wakatobi, mengingat bahwa betapa besar peran perempuan di dalam sistem kepemimpinan di dalam kesultanan Buton di masa lalu. Dimana perempuan Wakatobi Buton pernah mengalami masa-masa yang gemilang dan sistem ini diterapkan dalam kerajaan Buton selama beberapa abad⁴. Selama itu pula, keterlibatan perempuan dalam kebudayaan maritim Wakatobi Buton begitu besar. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan perempuan sebagai ratu dan sebagai *oputa barwine* (yang mulia permaisuri) dan *sara barwine* (Dewan Perempuan) dalam

³ Empat *bharata* yang ada di kesultanan Buton yaitu (1) Kaedupa, (2) Tiworo, (3) Wuna dan (4) Kulisusu.

⁴ Yakni sejak raja pertama sampai sultan terakhir yaitu Sultan La Ode Walihi pada tahun 1960-an

sistem pemerintahan kesultanan Buton (Udu, 2009: 2). Di samping itu, di dalam dunia pelayaran, perempuan Buton adalah penentu sukses atau tidaknya seorang suami di luar rumah, akan banyak ditentukan oleh ketengangan seorang istri di dalam rumah. demikian juga sebaliknya, keselamatan istri dan anak-anak di dalam rumah akan ditentukan oleh bagaimana perilaku suami di luar rumah (perahu) dan tempat rantau.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang keterlibatan perempuan dalam kebudayaan maritim Wakatobi Buton, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Pierre Bourdieu sehingga dapat dipetakan habitus perempuan maritim Wakatobi Buton, serta berbagai ranah yang mereka lewati dalam peradaban itu. Oleh karena itu, diperlukan studi pustaka dan studi lapangan untuk mengetahui berbagai informasi mengenai eksistensi perempuan di dalam kebudayaan maritim Wakatobi Buton di masa lalu, sedangkan pengamatan dan wawancara dilakukan untuk mengetahui eksistensi perempuan di dalam kebudayaan Wakatobi Buton yang ada dewasa ini. Selanjutnya data dianalisis dengan metode deskriptif analisis untuk menjelaskan habitus, ranah, yang dilewati oleh perempuan dalam kebudayaan maritim Wakatobi Buton yang meliputi masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang.

POTENSI PEREMPUAN DALAM KEBUDAYAAN MARITIM

Untuk menjelaskan peran perempuan di dalam kebudayaan maritim Wakatobi Buton, maka kita tidak dapat melepaskan diri bagaimana peran perempuan di dalam sistem kesultanan Buton. Oleh karena itu, peran perempuan di dalam kebudayaan maritim Wakatobi Buton diuraikan sebagai berikut.

1. Habitus Perempuan dalam Ranah Pemerintahan

Keterlibatan perempuan dalam bidang pemerintahan kesultanan Buton, dapat dilihat keberadaan perempuan sebagai ratu pertama dan ratu kedua kerajaan Buton (Udu, 2009: 2). Ini menunjukkan bahwa perempuan waktu itu memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan kerajaan Buton. Tetapi setelah raja Buton kelima sekaligus sultan Buton pertama (Lakilaponto/Latimba-timbanga) (Zuhdi, 1995: 54), kedudukan perempuan di dalam pemerintahan kesultanan Buton sudah mengalami kemerosotan. Sejak saat itu, perempuan tidak pernah lagi menduduki posisi sebagai sultan dalam pemerintahan kesultanan Buton (Udu, 2009: 3). Kondisi ini, membawa perempuan tidak lagi menduduki jabatan sebagai raja hingga menyantunya kesultanan Buton pada tahun 1960⁵ dengan NKRI.

Walaupun perempuan tidak dapat lagi menduduki posisi sebagai sultan, tetapi perempuan masih terlibat dalam sistem pemerintahan kesultanan Buton. Keterlibatan perempuan tersebut dapat dilihat dari adanya prosesi pelantikan istri sultan sebagai *Oputa Bawina* (permaisuri) yang hampir sama dengan upacara untuk

⁵ Pada tahun 1960-an, sultan terakhir Buton wafat dan tidak diperbolehkan lagi untuk melantik sultan pengganti.

pelantikan sultan. Pelaksana upacara itu ialah istri para pejabat yang terlibat dalam upacara pelantikan sultan (Berg, 1939: 519; Udu, 2009: 3).

Dalam tugasnya sebagai *oputa bawina* (yang mulia permasuri), perempuan memiliki peran penting yaitu menjaga keselamatan dan kesejahteraan kesultanan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Schoorl (2003: 217) bahwa, peran perempuan dalam menjaga tingkat kesejahteraan kesultanan dan masyarakat Buton masih dianggap sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari peran *oputa bawina* (permasiuri) yang menjaga keselamatan kesultanan dari berbagai macam penyakit, bencana dan panen yang gagal. Ia juga secara khusus menjaga kesehatan sultan.

Berdasarkan analisis Pierre Bourdieu, dijelaskan bahwa salah satu syarat seseorang dapat sukses di sebuah ranah paling tidak harus memiliki empat modal yaitu (1) modal kultural, (2) modal sosial, (3) modal simbolik dan (4) modal finansial. Kalau melihat syarat sultan Buton adalah kelayakan istri untuk menjadi permaisuri, maka ada beberapa habitus yang harus dimiliki oleh seorang permaisuri dalam sistem pemerintahan kesultanan Buton, (1) harus memiliki kemampuan untuk mengelola aspek finansial, (2) harus memiliki habitus⁶ untuk melindungi kesultanan dari musibah, wabah, (3) harus memiliki kemampuan batiniah untuk melindungi sultan dan kesultanan.

Di sini, modal kultural yang harus dimiliki oleh seorang permaisuri harus memiliki dan memahami faham Buton sebagai modal kultural mereka. Seorang perempuan Buton juga harus menjadi guru bagi anak-anak dan perempuan di dalam kesultanan Buton. Oleh karena itu, seorang perempuan harus memiliki habitus dibidang pendidikan, baik mengenai ilmu tentang faham kebutonan yang berbasis pada kangkilo dan faham sufisme, maupun berbagai ilmu pengetahuan tentang keduniaan. Oleh karena itu, seorang perempuan maritim Wakatobi paling tidak harus memiliki beberapa modal kultural yang berkembang di dalam kebudayaan Wakatobi Buton di atas.

Kalau kita merujuk pada sejarah perempuan Buton, maka perempuan bertanggung jawab atas beberapa hal, yaitu (1) merawat anak, (2) mencari rezeki bersama-sama dengan suami, (3) mendidik anak, dan (4) melakukan amalan, (*amala*) untuk melindungi keselamatan suami disaat berada di luar rumah (Udu, 2006: 145; Udu, 2009: 3). Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, diuraikan dalam *Sarana Azali* dan *Sarana Susua* bahwa perempuan berkewajiban untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perawatan dan pendidikan anak-anak di dalam kesultanan. Di sini, merupakan ranah paling penting dalam konteks pengembangan kebudayaan maritim Wakatobi Buton, dimana kita harus mengembalikan marwah

⁶ Habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia, dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia tersebut. Habitus seseorang begitu kuat, sampai mempengaruhi tubuh fisiknya. Habitus yang sudah begitu kuat tertanam serta mengendap menjadi perilaku fisik disebutnya sebagai Hexis. <https://rumahfilsafat.com/2012/04/14/sosiologi-kritis-dan-sosiologi-reflektif-pemikiran-pierre-bourdieu/> diakses pada tanggal 16 Mei 17

keluarga sebagai lembaga pendidikan terpenting dalam sejarah perkembangan seorang individu.

Jika rumah kita kembalikan marwahnya menjadi lembaga pendidikan terpenting, maka perempuan dalam kebudayaan matirim wakatibu Buton hendaknya harus memiliki habitus yang sangat luar biasa. Karena perempuan adalah guru pertama dalam ranah keluarga. Masa depan generasi maritim Wakatobi Buton, akan terletak pada kemampuan seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya.

Di samping itu, keberadaan perempuan dapat dilihat dari pandangan hidup masyarakat Buton yang memandang bahwa kesuksesan hidup hanya dapat diraih jika ada keharmonisan suami istri dalam keluarga. Segala percekokan dalam rumah tangga akan berdampak negatif pada masa depan kehidupan mereka, sebaliknya keharmonisan keluarga akan berdampak positif pada kesuksesan keluarga. Demikian juga dalam sistem pemerintahan, bahwa keharmonisan keluarga kesultanan akan berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan keluarga, sebaliknya jika permaisuri tidak dapat menjalankan tugasnya dalam mendampingi sultan, maka akan berdampak negatif bagi jalannya pemerintahan (Udu, 2009: 3).

Seorang perempuan dalam kebudayaan maritim Wakatobi Buton harus mampu tampil sebagai pemimpin, ketika suaminya berada di luar rumah. Dia harus mampu mengambil kebijakan, menjaga keamanan, menjaga kesejahteraan, hingga ia menjadi guru bagi anak-anaknya. Dalam doktrin kebudayaan maritim Wakatobi Buton masih terpatir bahwa keselamatan suami di luar rumah akan ditentukan oleh kemampuan istri yang melindunginya dari dalam rumah, demikian sebaliknya, keselamatan perempuan dan anak-anak di dalam rumah akan dipengaruhi oleh perilaku suami selama berada di luar rumah. Doktrin ini kemudian melahirkan sebuah konsep, saling menjaga yang apabila kita kembalikan kepada konsep sara patanguna, maka konsep (1) *pomaamasiaka* (saling mengasihi), (2) *popiapiaraka* (saling memelihara), (3) *pomaemaekaka* (saling menakutkan), (4) *poangkaangkataka* (saling menghormati) menjadi habitus yang harus dimiliki oleh perempuan dalam kebudayaan maritim Wakatobi.

Mengapa seorang istri harus melindungi suaminya dari dalam rumah yang secara rasional tidak mungkin terjadi, karena konsentrasi suami di luar rumah akan ditentukan oleh ketenangan istri di luar rumah. Mereka akan selalu menyangi anak-anak dan suaminya dengan berusaha untuk mencurahkan seluruh cinta kasihnya pada anak-anak dan suaminya. Perempuan di dalam rumah juga akan selalu berusaha untuk selalu memelihara kehormatan anak-anak, suami, keluarga, kampung, hukum dan agamanya selama suaminya berada di luar rumah. Mereka akan malu pada diri sendiri, ketika mereka mempermalukan keluarga, tidak mampu menjaga anak-anak, tidak mampu menjaga pergaulannya sendiri. Mereka akan takut jangan sampai suaminya malu karena perbuatannya, mereka akan rela menderita termasuk meminta pada mertua atau orang tuanya, selagi dia masih bisa, demi menjaga harga diri suaminya. Karena sekali ia meminta, maka sama dengan ia mempermalukan suaminya di hadapan orang lain. Di sanalah, mereka harus menjadi manejer keuangan yang tangguh, yang mampu meramalkan masa depan dengan baik. Di ranah ini, terkadang perempuan sudah dapat menjadi kekuatan ekonomi keluarga, menjadi petani dan sekaligus menjadi nelayan.

Di sisi yang lain, dewasa ini paham tersebut sudah mulai dilupakan oleh masyarakat Wakatobi Buton sendiri. Bahkan kalau melihat beberapa refleksi budaya tentang karakter budaya yang meliputi hubungan laki-laki dan perempuan, aspek kesetiaan (turu) dalam kehidupan rumah tangga, tinggah setipis kulit bawang, hal ini dapat dilihat dari teks lagu Wakatobi berikut.

<i>La'amo tolu komba na langkesu</i>	baru saja tiga bulan saya berangkat
<i>nulolahamo te mia hele</i>	kau sudah mencari orang lain
<i>umura ara sata'o na langkesu</i>	mungkin kalau satu tahun saya berangkat
<i>koumangga aku kua ngkumatemo</i>	kau akan menganggapku sudah meninggal

Dari teks tersebut di atas, terlihat betapa habitus yang membuat perempuan Wakatobi menjadi tangguh sudah mulai memudar, tara (sabar, tabah dan tahan) yang menjadi simbol dari karakter turu (loyal) pada cinta dan tujuan yang pernah mereka bangun terhempas hanya karena mereka ditinggalkan. Masa tiga bulan, sudah mampu menggeser cinta dan kesetiaan mereka. Bagaimana kalau seperti masa-masa silam, perempuan Wakatobi Buton yang ditinggal bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, tetapi mereka tetap setia menunggu kedatangan suami, sabar mendidik anak-anak, serta berhatan mempertahankan harga diri keluarga. Mereka akan rela untuk mati dengan sikap mereka yang berpegang teguh pada kebenaran (toro).

Dalam pemilihan bupati/walikota di daerah eks kesultanan Buton misalnya, tidak lagi mempertimbangkan kelayakan istri apakah ia dapat menjadi panutan atau tidak. Karena perempuan tidak lagi dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam pemilihan bupati dan walikota, maka masyarakat Buton telah melupakan konsepsi kepemimpinan yang berwawasan jender. Pada hal di masa lalu, sistem kepemimpinan dan tatanan budaya masyarakat Buton sangat menghargai keberadaan perempuan dalam pemerintahan (Udu, 2009: 3).

2. Habitus dalam Ranah Budaya

Kedudukan dan peran perempuan dalam masyarakat Buton dipengaruhi oleh sistem pelapisan masyarakat. Ada empat lapisan masyarakat dalam masyarakat Buton, yaitu *kaomu*⁷, *walaka*⁸, *maradika*⁹ dan *batua*¹⁰. Berdasarkan pelapisan tersebut,

⁷ Lapisan tertinggi dalam masyarakat Buton, yang hampir sama dengan “kaum ningrat”. Mereka ini terdiri dari keturunan menurut garis bapak dari pasangan raja pertama.

⁸ Lapisan kedua, yaitu mereka yang berasal dari keturunan bapak dari para pendiri kerajaan Buton. Lelaki *kaomu* dalam menikahi perempuan *walaka*. Lapisan ini dapat memberhentikan penguasa. Lapisan ini terdiri dari tiga golongan yaitu *tapi-tapi*, *kumbewaha*, dan *tanailandu*.

laki-laki dapat menikahi perempuan yang sederajat dengannya atau perempuan yang lebih rendah derajatnya, tetapi perempuan tidak dapat menikahi laki-laki yang berada pada kelas sosial di bawahnya (Munafi, 2001). Pelapisan ini, sesungguhnya adalah ranah dimana perempuan semakin tidak berdaya menghadapi kulturnya sendiri. Perempuan sudah dianggap sebagai manusia kelas dua, perempuan sudah menjadi manusia yang ter subordinasi. Kebudayaan maritim Wakatobi Buton seakan lupa pada sejarah yang membesarkan namanya.

Berdasarkan pelapisan masyarakat Buton di atas, rupanya perempuan masih diposisikan dalam posisi subordinasi. Mengapa laki-laki dapat menikah dengan perempuan di bawahnya, sedangkan perempuan tidak dapat menikah dengan laki-laki di bawah strata sosialnya? Rupanya aspek sosial kultural tersebut telah melenceng dari undang-undang martabat tujuh yang termaktub dalam *sarana Wolio* yang memberikan penghargaan kepada masyarakat atas karyanya. Dimana yang dihormati itu ada empat banyaknya (1) karena keberaniannya, (2) karena kealimannya, (3) karena mengorbankan hartanya, dan (4) karena membawa kepandaianya di jalan pemerintah dalam menyelesaikan pekerjaan *pemerintah Wolio* (Niampe, 2007: 220-221).

Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan kesultanan Buton, pelapisan masyarakat tersebut tidak ada, sehingga bagi mereka yang paham tentang martabat tujuh (*Sarana Wolio*), tidak memberikan gelar “ode¹¹” pada nama anak-anaknya. Sedangkan pada keluarga yang tidak faham akan berpegang teguh pada strata sosial tersebut, dan bagi mereka yang berasal dari *kaomu* dan *walaka* akan memberikan gelar ‘*la ode*’ dan ‘*wa ode*’ di depan nama anak-anak mereka. Sehingga dalam proses pernikahan pun akan selalu mempertanyakan strata sosial¹².

Sehubungan dengan strata sosial tersebut, tidak sedikit keluarga yang menggunakan gelar ‘*ode*’ itu yang malu ketika mempersoalkan mahar dengan masyarakat yang tidak menggunakan ‘*ode*’ bagi anak-anak mereka. Tetapi setelah membuka silsilah dan sejarah, mereka yang tidak menggunakan gelar ‘*ode*’ itu ternyata justru mereka yang lebih pantas untuk mendapatkan gelar ‘*ode*’ tersebut.

Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan kesultanan Buton, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Karena masyarakat Buton mengenal hukum *pobinci-binciki kuli* yang meliputi *pomaa-masiaka*, *popia-*

⁹ *Maradika* atau biasa juga disebut *papara* merupakan lapisan masyarakat Buton yang merdeka dan tinggal di lingkungan *kadie* (desa). Mereka dapat memegang jabatan di lingkungan *kadie*, tetapi mereka tidak dapat memimpin di pusat kerajaan.

¹⁰ *Batua* merupakan lapisan masyarakat Buton yang tidak merdeka disebabkan karena perbuatan mereka, misalnya melanggar adat, tidak mampu membayar hutang. Tetapi di sisi yang lain, ada anggapan bahwa *batua* bukan lapisan masyarakat melainkan komunitas masyarakat yang ter hukum saja.

¹¹ Bagi sebagian masyarakat Buton ‘*ode*’ dianggap sebagai penanda lapisan sosial masyarakat, sementara undang-undang menganggap bahwa itu adalah penghargaan atas orang-orang yang berjasa pada kesultanan.

¹² Hasil wawancara dengan *lakina* Mandati

piaraka, poangka-angkataka poma-maeaka. Saling menyayangi, saling memelihara, saling menghormati dan saling takut menakutkan (Putra, 2000: 86). Manusia dihormati bukan karena jenis kelaminnya melainkan karena karyanya. Hal ini dapat dilihat dari pemberian gelar kepada perempuan Buton (Wa Ode Wau) yang telah menggunakan hartanya dalam pembangunan benteng Buton. Sebelumnya ia belum mempunyai gelar 'ode', tetapi karena jasanya, ia dihormati dan dianugerahi dengan gelar 'ode'¹³. Selanjutnya, seseorang yang bergelar 'ode' tidak tertutup kemungkinan untuk dicabut dari namanya apabila ia melanggar adat atau hukum yang membuat harkat dan martabatnya di turunkan. Sebagai contoh, seorang sultan (*oputa igogoli*) yang terbukti mengganggu istri orang dihukum mati oleh dewan *Siolimbona*.

Dalam menjalankan peranya baik di dalam ranah domestik maupun di ranah publik, perempuan dalam kebudayaan maritim Wakatobi Buton hendaknya memahami konsep *kangkilo awalu*¹⁴ dan *kangkilo ahiri*¹⁵ yang kemudian dimanifestasikan di dalam konsep *tara, turu, toro*. Melalui konsep *tara* seorang perempuan Wakatobi harus memiliki sifat tabah, sabar dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Mereka tidak boleh putus asa, baik yang menyangkut masalah di ranah domestik maupun masalah yang mereka hadapi di ranah publik. Perempuan Wakatobi harus memiliki habitus sebagai orang yang sabar, tabah dan tidak mudah putus asa.

Selanjutnya, habitus lain yang harus dimiliki oleh perempuan waritim Wakatobi Buton adalah *turu*, yaitu sebuah habitus dimana perempuan maritim Wakatobi Buton memiliki prinsip yang loyal. Seorang perempuan harus loyal pada tujuan hidup dirinya sebagai seorang perempuan, ibu, dan seorang istri. Mereka harus mampu berjuang mati-matian, sampai titik darah penghabisan untuk menjaga tujuan hidup mereka, baik sebagai seorang individu, istri, ibu dan sebagai anggota masyarakat Wakatobi. Mereka harus tunduk dan patuh pada nilai-nilai budaya yang beredar di dalam masyarakatnya.

Dalam konteks sebagai seorang individu, istri dan ibu perempuan harus memiliki kemampuan untuk mengabdikan, dan loyal pada cita-cita yang dibangunnya,

¹³ Dalam perkembangan terakhir, ada beberapa tokoh nasional yang dianugerahi dengan gelar 'ode', antara lain adalah mantan anggota DPR RI utusan dari Buton La Ode Jeni Hasmar, Wa Ode Puan Maharani dan yang terakhir adalah pemberian gelar ode kepada menteri agama RI

¹⁴ *Kangkilo awalu* merupakan sebuah konsep budaya dimana seseorang dalam kebudayaan maritim Wakatobi Buton harus mampu mensucikan semua hal yang masuk ke dalam tubuhnya melalui lima panca indranya. Mereka harus mampu mensucikan tiga dimensi dirinya, yaitu fisik, pikiran dan rasa.

¹⁵ *Kangkilo akahiri* merupakan konsep budaya yang menjelaskan tentang bagaimana masyarakat Buton menjaga kesucian tindakan, pikiran dan rasanya agar apapun yang mereka kerjakan, pikiran, dan rasakan jangan mengganggu atau mengotori fisik yang lain, pikiran yang lain, dan rasa yang lain. Konsep ini diarahkan agar manusia Buton selalu berusaha untuk menjadi rahmatan lililalamain, bukan mengambil barang orang, mengambil istri atau suami orang, termasuk merusak lingkungan (membuang sampah sebarang), membicarakan orang lain (bergunjing)

cita-cita keluarganya, maupun pada cita-citanya sebagai ibu yang kelak akan melahirkan anak-anak hebat. Anak-anak hebat tidak akan lahir dari seorang ibu yang tidak memberikan kasih sayang dan harapan. Dada seorang istri adalah tembok terakhir seorang suami ketika hatinya gundah, demikian juga dada seorang ibu adalah benteng terakhir sekaligus mata air yang membuat setiap anak nyaman dalam menyandarkan hidupnya, membangun harapannya.

Sementara habitus lain dalam kebudayaan masyarakat maritim Wakatobi adalah aspek *toro* atau tetap berpegang teguh pada aturan dan tujuan hidup yang dibangun di dalam keluarga dan masyarakat. Dia harus objektif, adil dan tidak memihak pada siapapun, kecuali pada kebenaran yang tuntun oleh ajaran agamanya. Di sini, perempuan sejati harus mampu memahami empat pintu tanah Buton¹⁶ dalam menyelesaikan berbagai persoalan, sehingga di dalam ranah ini perempuan adalah guru demokrasi yang paling penting.

Sudah saatnya untuk melibatkan anggota keluarga dalam berbagai pengambilan keputusan. Di ranah ini perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka memiliki pengetahuan tentang konsekuensi dari kebijakan yang diambil dalam keluarganya.

3. Habitus dalam Ranah Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, peran perempuan dalam pemerintahan kesultanan Buton dapat dilihat dari adanya tugas perempuan (*permaisuri*) dalam menjaga kesejahteraan kesultanan. Ini merupakan tugas penting seorang *permaisuri* dalam mendampingi sultan. Dalam tugasnya untuk menjaga kesejahteraan kesultanan ini, *permaisuri* memegang tanggung jawab yang berat, antara lain ia harus selalu melakukan semedi (*amala*) dan ia tidak diperkenankan untuk keluar rumah demi melindungi kesultanan dari gagal panen (Schoorl, 2003: 217; Udu, 2009: 5). Dalam ranah ekonomi, perempuan Wakatobi hendaknya memiliki habitus dalam bidang manajemen keuangan yang baik. Dia harus memiliki kemampuan untuk menentukan mana kebutuhan dan mana keinginan. Dengan kemampuan untuk memisahkan dua aspek ini, perempuan kita akan mampu menentukan skala prioritas dalam pengelolaan keuangan keluarga. Perempuan yang tidak memiliki manajemen keuangan yang baik, biasa dikenal dengan perempuan padang pasir, karena sebanyak apapun penghasilan suami, maka semua akan habis, karena ia tidak dapat membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan.

Dalam ranah kesultanan, seorang *permaisuri* memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan kesultanan Buton, karena keselamatan dan kesejahteraan kesultanan berada di tangannya. Sehubungan dengan tugas

¹⁶ Empat pintu tanah Buton adalah empat cara penyelesaian masalah yaitu (1) *gau* yakni setiap orang yang terkait dengan masalah diberikan ruang untuk membicarakan masalah dari sudut pandang yang dia miliki. (2) *pombala*, yaitu tahapan penyeleksian berbagai informasi yang terkait dengan masalah, sehingga akan menemukan akar masalah, (3) musyawarah dan (4) mufakat.

keselamatan kesultanan tersebut, Wa Ode Wau dalam membantu permaisuri bersedia untuk mendanai pembangunan benteng Wolio di zaman sultan La Buke. Selanjutnya, jika kesultanan mengalami gagal panen dan terjadi musim paceklik, maka yang disalahkan bukan sultan, tetapi yang disalahkan adalah permaisuri (Udu, 2009: 5).

Dalam pandangan masyarakat Buton, kesejahteraan keluarga sangat ditentukan oleh perempuan¹⁷. Seorang pedagang yang berlayar dengan perahu karoro ke luar daerah, rezekinya ditentukan oleh keberadaan istri di dalam rumah. Kesuksesan suami di dalam bidang ekonomi merupakan kesuksesan istri di dalam rumah. Inilah yang menjadikan perempuan maritim Wakatobi Buton memiliki peran penting dalam pengelolaan ekonomi keluarga dan kesultanan Buton. Dengan demikian, di dalam kesuksesan seorang laki-lak, sesungguhnya ada perempuan hebat yang selalu menuntun jalannya. Perempuan seharusnya dapat menjadi permaisuri dalam novel *Taj Mahal*, dimana ia akan hadir untuk melihat suaminya dari jauh, jika suaminya masih berjalan dengan normal dalam pembangunan ekonomi dan pemerintahan, tetapi ia akan tampil lebih depan jika suaminya sudah berhenti karena masalah. Seorang istri dalam kebudayaan maritim Wakatobi Buton juga harus tampil seperti istrinya Mochtar Riady yang tampil sebagai penyelamat ekonomi keluarga (menjahit) ketika suaminya bangkrut, walaupun saat ini menjadi orang sukses di Indonesia (pemilik Lippo Group) (Riady, 2014).

Jika sebuah keluarga mengalami kesuksesan di bidang ekonomi, maka pertanyaan orang-orang Buton adalah “siapa istrinya?”, bukan “siapa suaminya”, karena dalam pemahaman orang-orang Buton bahwa dunia luar sangat dipengaruhi oleh keharmonisan di dalam keluarga. Bahkan dalam beberapa kasus terakhir, perempuan Wakatobi Buton telah mengalami keunggulan dalam dunia bisnis. Mereka telah menguasai hampir beberapa pasar di Wakatobi. bahkan mereka juga sudah bertugas sebagai pembeli barang di Makassar, Surabaya dan Jakarta.

Lebih jauh dijelaskan bahwa, dalam menjaga kesejahteraan sosial tersebut, masyarakat percaya bahwa untuk memulai pembukaan lahan pertanian atau mengawali panen harus dimulai oleh seorang perempuan cantik dan banyak anaknya serta berkecukupan dalam kehidupan keluarganya¹⁸. Karena perempuan cantik dan banyak anak serta berkecukupan tersebut merupakan simbol dari keberuntungan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan di dalam sistem pemerintahan terutama dalam bidang ekonomi sangat penting. Keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi dewasa ini semakin besar, hal ini dapat dilihat dari banyak perempuan yang terlibat dalam dunia perdagangan di Buton.

Dengan demikian, diperlukan beberapa habitus untuk seorang perempuan yang dapat sukses di ranah ekonomi, yaitu dia juga harus tabah, sabar, memberikan

¹⁷ Hasil wawancara dengan La Ode Balawa, ia mengatakan bahwa kesuksesan masyarakat Buton sedikit banyak dipengaruhi oleh keberadaan perempuan di dalam rumah.

¹⁸ Kasus ini dapat ditemukan pada kuburan perempuan cantik dan banyak anak yang kuburannya adalah di sebelah timur benteng Patua.

pelayanan yang menarik. Di samping itu, perempuan maritim Wakatobi juga harus memiliki sifat *loyal* pada tujuan dan komiteman yang ingin dibangunnya. Di sini, diperlukan juga upaya untuk terus menerus memperbaharui harapannya, dan berkimiten untuk mewujudkan setiap fase dari harapan yang dibangunnya. Selanjutnya mereka juga harus objektif, rasional dan selalu berada pada nilai-nilai kebutuhan yang dibangun dalam konsep *kangkilo* dan *sara patanguna*.

Kesuksesan perempuan maritim Wakatobi dalam ranah ekonomi tentunya tidak dapat dipisahkan dari modal budaya, modal sosial, modal simbolik dan serta finansial yang mereka miliki. Namun, modal budaya, modal sosial merupakan aspek penting untuk berkembangnya modal finansial. Orang-orang yang berjuang di ranah ekonomi modal utamanya adalah kepercayaan, yang didapatkan dari sifat saabar, tahan, tidak mudah putus asa, serta mereka yang memiliki sifat *loyal* atau komitmen pada setiap harapan yang dibangunnya. Di samping itu, mereka juga harus selalu berpegang teguh pada nilai-nilai moral, terutama pada aspek nilai-nilai budaya yang dibangun di dalam ranah ekonomi tersebut.

4. Habitus di Ranah Pendidikan

Perempuan adalah literasi hidup yang paling besar perannya di dalam pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang perempuan hebat hendaknya memiliki kebiasaan membaca, dan berdiskusi sebagai ruang untuk membentuk habitus di dalam ranah pendidikan. Ia harus mampu hidup sebagai sumber rujukan bagi anak-anaknya. Untuk itu, seorang perempuan maritim Wakatobi hendaknya mampu memiliki kemampuan membaca minimal 2 buku perhari. Mereka juga harus mampu menjadi guru-guru bagi anak-anaknya, lingkungannya dan masyarakatnya.

Di dalam ranah pendidikan, *permaisuri* (*oputa bawine*) berperan sebagai guru di dalam lingkungan kerajaan. Dalam tugasnya sebagai guru tersebut, perempuan memegang peran strategis dalam menanamkan konsep kepada generasi Buton di masa depan. Masa depan Kesultanan Buton berada di tangan perempuan sebagai guru. Oleh karena itu, *permaisuri* harus memiliki ilmu yang tinggi. Baik ilmu keduniaan maupun ilmu-ilmu kebatinan (*amala*) (Udu, 2009: 6, Udu, 2015; 53-56).

Di bidang sastra, masyarakat Buton mengenal Wa Ode Samarati sebagai sastrawan. Ia menulis *kabanti* yang berjudul *Kanturuna Molingkana* (lampu dalam perjalanan) (Niampe, 1998: 61). Keberadaan penyair perempuan tersebut, tentunya berhubungan dengan tugas-tugas perempuan (*permaisuri* dan *Sarana Bawine*) dalam memberikan pendidikan bagi perempuan di lingkungan istana. Perempuan bukan hanya menjadi guru yang mentransfer ilmu pada anak-anaknya, tetapi yang paling penting adalah perempuan yang mampu memberikan inspirasi bagi anak-anaknya. Mereka harus mampu membangun mimpi dan harapan bagi anak-anaknya. Perempuan hebat adalah membangun mimpi anak-anaknya, dan membantunya untuk mencari tangga pertama dalam mewujudkan mimpi itu. Selanjutnya, tidak sedikit perempuan yang menghabisi mimpi dari anak-anaknya, mereka adalah predator bagi anak mereka sendiri, tidak pernah membiarkan anak-anak mereka tumbuh berpikir, bahkan tidak jarang perempuan dan suami yang melahirkan anak-

anak mereka tanpa kepala dan dada yang terlubang. Hingga mereka selalu memberikan pikiran mereka kepada anak-anak mereka, mereka memberikan perasaan mereka kepada dada anak-anak mereka. Dalam ranah ini, perempuan maritim seharusnya menjadi sumber inspirasi dan sumber pengharapan bagi anak-anak mereka. Ibu yang hebat, akan mampu membuat target hidup yang selalu membangkitkan inspirasi bagi anak-anak dan masyarakatnya.

Di zaman kesultanan Buton, tugas perempuan (*permaisuri*) dalam bidang pendidikan ini dilakukan mulai sejak proses pendidikan calon ibu di dalam lingkungan kesultanan, terutama mengenai ilmu *berumah tangga* (bdk. Udu, 2006: 6; Udu, 2009: 6). Karena menurut orang-orang Buton, pendidikan seseorang sudah harus dimulai sejak dalam proses pembuatannya. Jadi calon ibu sudah harus mempelajari ilmu *berumah tangga* yang diajarkan oleh *permaisuri* bersama-sama dengan *sara bawine* (Dewan Perempuan). Konteks tradisi *sombo'a*¹⁹ merupakan momentum kaderisasi perempuan dalam kebudayaan maritim Wakatobi Buton. Di sini, seorang perempuan harus membentuk habitusnya, sehingga ia mampu bersaing di dalam ranah pendidikan, sebagai seorang ibu yang harus mendidik anak, masyarakat dan lingkungannya.

Untuk kepentingan ilmu *berumah tangga* inilah masyarakat Buton mengenal *kabanti Kaluku Panda Atuwu Incana Dempa* (Rusdin, 2002: 117; Udu, 2007: 3). Sebab ilmu *berumah tangga* ini merupakan puncak ilmu pengetahuan di dalam masyarakat Buton. Karena ilmu *berrumahtangga* tersebut berhubungan dengan berbagai bidang kehidupan selanjutnya. Di sinilah perempuan (*permaisuri*) diatur dalam *sarana susua* untuk merawat dan mendidik anak-anak dan perempuan Buton yang ada di lingkungan kesultanan. Perempuan maritim Wakatobi hendaknya memiliki habitus untuk dapat bertahan di dalam berbagai ranah, termasuk di dalam ranah pendidikan. Perempuan dalam kebudayaan maritim Wakatobi hendaknya mendapatkan ranah pendidikan yang baik, mulai dari rumah tangga, sekolah, dan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat Buton dewasa ini, pendidikan anak-anak seperti ini tidak lagi menjadi tanggung jawab perempuan. Sehingga peran pendidikan ini lebih banyak diserahkan ke guru-guru di sekolah. Dan peran *sara Bawine* untuk melakukan pendidikan mengenai ilmu *berumah tangga* kepada gadis-gadis dalam kegiatan *sombo'a* tidak lagi maksimal atau bahkan sudah terlupakan. Akibatnya ilmu tentang *berumah tangga* seperti ini tidak didapatkan lagi oleh gadis-gadis Buton yang kelak akan mendirikan rumah tangga. Maka tidak heran, peran pendidik yang dulu diperankan oleh perempuan sudah tidak ada dalam masyarakat Buton. Dan parahnya lagi kegiatan *sombo* (*pingitan*) tinggal dilakukan sebagai ritual belaka tanpa menyentuh esensinya sebagai sarana pendidikan ilmu *berumah tangga* bagi masyarakat Buton.

¹⁹ *Sombo'a* merupakan tradisi pengkaderan anak-anak perempuan Wakatobi yang berlanjut selama berbulan-bulan. Mereka akan diajari berbagai ilmu sebagai habitus mereka ketika menjalani hidup di usia dewasa, termasuk di dalam ranah ekonomi.

5. Habitus dalam Ranah Politik

Kemampuan seorang perempuan yang mau memasuki ranah politik, harus multitalenta. Ia harus mampu bermain di dalam dua ranah yang berbeda dalam waktu bersamaan, karena ia harus tetap mampu menjaga perannya di ranah domestik dan perannya di ranah publik. Untuk itu, perempuan maritim Wakatobi harus benar-benar menjaga keseimbangan ini.

Untuk melihat keterlibatan perempuan dalam ranah politik, maka sejak awal perempuan Buton telah dinobatkan menjadi raja. Di samping itu, juga dikenal *sara bawine* (dewan perempuan) yang dipimpin oleh permaisuri. Keterlibatan *sarana bawine* (dewan perempuan) ini bertugas untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan kesultanan. Di samping itu, *sara bawine* ini tentunya bertugas untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di dalam kesultanan Buton. Misalnya, tugas perempuan di bidang adat dan budaya, bidang pendidikan dan lain-lain (Udu, 2009: 7).

Di dalam masyarakat Buton, khususnya masyarakat Wangi-Wangi mengenal tarian *honari mosega*. Dalam performansi tarian ini, perempuan masuk mendahului kaum laki-laki. Ini menunjukkan bahwa dalam hal negosiasi dan peperangan perempuan Buton lebih banyak unggul di banding dengan laki-laki. Di samping itu, tarian ini merupakan ingatan kolektif masyarakat Buton tentang strategi perang dalam menghadapi musuh. Hal ini merupakan aplikasi konsep politik bangsa Buton yang terdapat dalam kitab *Bula Malino* karya Muhamad Idrus Kaimuddin sebagaimana pernyataan (La Ode Malim, 1983: 16) yang mengatakan bahwa jika musuh datang dengan kekuatannya hadapi dengan kelembutanmu tapi jangan minta dilindungi, jika musuh datang dengan kepintarannya hadapi dengan kebodohanmu, tapi jangan berguru, jika musuh datang dengan kekayaannya, hadapi dengan kemiskinanmu, tapi jangan meminta, dan jika musuh datang dengan kelemahannya, maka lindungilah dan perlakukanlah dengan baik.

Di dalam undang-undang tentang partai politik, perempuan sudah diberi ruang untuk mengisi 30% dari setiap partai. Namun, dalam konteks Wakatobi keberadaan perempuan belum sepenuhnya tampil sebagai sebuah prestasi yang membanggakan, walaupun saat ini Wakatobi memiliki ruang ekspresi *wowine* sebagai ruang perjuangan yang digagas oleh para perempuan yang duduk di legislatif, eksekutif baik di pusat maupun di daerah. Ini kita perlu apresiasi bahwa perempuan Wakatobi sudah mampu bersaing di ranah publik, tetapi ingat, bahwa perempuan tidak boleh melupakan ranah domestik. Tentunya di kedua ranah ini, laki-laki dan perempuan seharusnya harus saling bersubsitusi dalam berbagai momentum. Walaupun ketika laki-laki ditempatkan di ranah domestik, maka mereka akan mengalami masalah, karena mereka tidak akan sanggup.

Dewasa ini, keterlibatan perempuan dalam sistem pemerintahan tidak lagi nampak dalam sistem pemerintahan di daerah-daerah ex-kesultanan Buton. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan perempuan di dalam pemerintahan kabupaten/kota yang rata-rata dikuasai oleh kaum laki-laki. Dengan demikian, keterlibatan perempuan di dalam sistem pemerintahan kesultanan Buton di masa lalu, dewasa ini keterlibatan perempuan dalam kebudayaan maritim Wakatobi sudah mulai nampak,

mulai dari legislatif di DPRD, DPD dan DPR RI pernah lahir dari Wakatobi. Di samping itu, di dalam wilayah kesultanan Buton, ada tiga orang wakil bupati yang dijabat oleh seorang perempuan.

Dalam konteks Wakatobi modern, habitus yang dibutuhkan untuk dapat survive adalah tidak adanya politik balas dendam. Seorang perempuan Wakatobi maritim, hendaknya memiliki habitus untuk memberikan ampunan dan memaafkan musuh-musuh politiknya. Karena banyak contoh politisi yang hanya tercatat sebagai representasi kejahatan atas tindakannya yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Upaya yang dilakukan oleh Hitler, yang menghabisi semua lawan-lawan politiknya berakhir dengan nasib yang naas, dan dicatat dalam sejarah sebagai sejarah kejahatan manusia. Di sini perempuan harus memiliki kemampuan untuk memiliki sifat keibuan, dimana seorang politisi harus memiliki tingkat kesabaran, ketabahan, dan mampu memaafkan. Tanpa ada upaya memaafkan, maka tidak mungkin kita dapat membangun masyarakat dengan baik.

IDEOLOGI YANG MEMPENGARUHI PEREMPUAN DALAM KEBUDAYAAN MARITIM WAKATOBI

Untuk lebih memahami peran perempuan di dalam sistem pemerintahan kesultanan Buton tersebut, perlu dibongkar ideologi yang membentuk peran perempuan dalam kehidupan masyarakat Buton. Di dalam masyarakat Buton, perempuan tidak melakukan pekerjaan berat karena mereka dihormati. Tetapi, rupanya tidak semua perempuan senang dengan jalan pikiran ini. Hal ini disebabkan karena dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa jika perempuan memenuhi kewajiban dalam rumah tangganya, ia akan masuk surga lebih dahulu dari suaminya. Lagi pula, semua “hiasan” di surga adalah perempuan dan perempuan yang setia akan menjadi bidadari.

Dalam mistisme Buton, hubungan laki-laki dan perempuan dilihat sebagai model semua hal lain ciptaan Tuhan. Itu dipakai untuk membandingkan serta mencapai pemahaman yang lebih baik. Tuhan menciptakan manusia sebagai model untuk semua makhluk lain. Semua makhluk harus sesuai dengan asal mula manusia, cara terjadinya manusia. Ini juga mencakup hubungan kasih sayang antara ayah dan ibu dalam proses lahirnya manusia.

Selanjutnya dalam mistisme Buton, orang mengenal mirajnya, naiknya manusia ke surga. Kaum sufi berupaya menjalin hubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ia berserah diri kepada Tuhan, harapan perwujudan. Ia berdoa dengan cara itu sambil memikirkan tahap-tahap terjadinya manusia. Jika seorang sufi tidak mengikuti tahap-tahap ini maka ia akan sesat. Doa seorang sufi dapat diketahui terkabul apabila mendapat perasaan yang hangat dan enak seperti dalam persetubuhan. Menurut kepercayaan adat Buton, Nabi Muhammad memiliki perasaan seperti itu ketika tiba di surga sewaktu mirajnya (bdk. Schoorl, 2003: 218).

Semua itu berarti bahwa dalam kebudayaan Buton, hubungan suami istri sangat dihargai. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perempuan juga amat dihargai sebagai kekuatan yang sebenarnya adalah inti kekuatan dari setiap peradaban. Tidak

salah apabila dalam kebudayaan Buton, menyebutkan bahwa negeri adalah perempuan dan anak-anak. Mereka ruang kebangkitan sebuah bangsa, ruang masa depan sebuah bangsa. Lemahnya perempuan (seorang ibu) akan juga melemahkan sebuah kekuasaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa keterlibatan perempuan di dalam sistem pemerintahan kerajaan Buton pada memegang peranan penting, tetapi setelah Buton menjadi sebuah kesultanan perempuan tidak lagi menduduki posisi-posisi strategis.

Setelah Buton menjadi kesultanan perempuan telah berada dalam ketegangan budaya, di satu sisi dihargai tetapi di sisi yang lain tidak lagi diberi kesempatan sebagaimana laki-laki. Sehingga banyak perempuan Buton yang ingin dititiskan sebagai laki-laki. Lebih jauh lagi, selain bidang ekonomi peran perempuan Buton dewasa ini sudah hampir hilang di dalam sistem pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Malim, La Ode. 1958. *Membara di Api Tuhan*. Ujung Pandang: Balai Bahasa Ujung Pandang
- Munafi, La Ode Abdul. 2001. *Langke dalam Kehidupan Orang Buton di Sulawesi Tenggara (Kajian Strukturalisme tentang Pranata Migrasi)*. Bandung : Tesis Program Pascasarjana Universitas Padjajaran
- Niampe, La. 1998. *Kabanti Bula Malino : Kajian Filologis Sastra Wolio Klasik*. Bandung : Universitas Padjadjaran: Tesis Program Pascasarjana.
- Putra, Maia Papara. 2000. *Membangun dan Menghidupkan Kembali Falsafah Islam Hakiki dalam Lembaga Kitabullah*. Makassar: yayasan AUA Menyingsing Pagi
- Rabani, L.O., 1997. *Migrasi dan Perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kepulauan Tukang Besi Kabupaten Buton 1961-1987*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada.
- Riady, Mochtar. 2014. *Otobiografi Mochtar Riady: Manusia Ide*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Rusdin, Ali. 2002. *Kaluku Panda: Telaah Filologis Naskah Wolio*. Bandung: Tesis Pascasarjana Universitas Padjajaran.
- Schoorl, Pim. 2003. *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton*. Jakarta: Djambatan, KITLV.
- Udu, S. 2009. "Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton: Suatu Tatanan Yang Terlupakan" dalam *Kepemimpinan yang Berprespektif Gender*. Sisparyadi (editor). Yogyakarta: Diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada dan PT Bigraf Bayu Indra Grafika.
- Udu, Sumiman. 2006. *Citra Perempuan dalam Kabanti: Tinjauan Sosiofeminis*. Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada.

- Udu, Sumiman. 2007. *Konsep Seks Masyarakat Buton dalam Naskah Kabanti Kaluku Panda Atuwu Incana Dempa: Tinjauan Semiotik dan Etnografi*. Bima NTB: Makalah Simposium Internasional Manassa tanggal 26-28 Juli 2007.
- Udu, S., 2015. Tradisi Lisan Bhanti-Bhanti Sebagai Media Komunikasi Kultural Dalam Masyarakat Wakatobi. *Humaniora*, 27(1), Pp.53-66.
- Zaenu, La Ode. 1984. *Buton dalam Sejarah Kebudayaan*. Surabaya: Suradipa.
- Zahari, Abdul Mulku. 1977/1978. *Sejarah dan Adat Wil Darul Butuni*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Depdiknas.
- Zuhdi, Susanto. 1999. *Labu Wana Labu Rope: Sejarah Buton Abad XVII-XVIII*. Jakarta: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Indonesia.